

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mencapai peningkatan dalam kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dan dapat dinikmati oleh semua pihak (Sukirno, 2011). Keberhasilan pencapaian kesejahteraan dapat diukur dengan sejauh mana suatu negara dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi, salah satu yang menjadi masalah utama yakni dalam hal ketenagakerjaan. Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan tantangan yang cukup kompleks bagi pemerintah terkait untuk diatasi. Fokus masalah ini tertuju pada kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah individu yang berhasil mendapatkan pekerjaan serta ketersediaan lapangan kerja yang ada (Fitriawati dkk, 2023). Fenomena penyerapan tenaga kerja di Indonesia bisa dilihat dari ketidakseimbangan penduduk usia kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja akibatnya populasi yang meningkat setiap tahunnya harus dimaksimalkan untuk pertumbuhan, terutama melalui penempatan tenaga kerja agar tidak berdampak terhadap naiknya angka pengangguran. Pengangguran dalam konteks ekonomi akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi kestabilan pada bidang lainnya.

Penyerapan tenaga kerja yang baik tidak hanya dapat mengurangi angka pengangguran, tetapi juga mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga berdampak pada peningkatan taraf masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan



kesejahteraan sosial, oleh karena itu indikator peningkatan kesejahteraan salah satunya ditandai dengan adanya kesempatan kerja yang diciptakan dari kegiatan pembangunan ekonomi. Mengingat manusia berperan sebagai roda penggerak pembangunan, kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini pembangunan ekonomi tentu akan sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja. Teori klasik menganggap bahwa manusialah yang merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya untuk dijadikan sebagai tujuan jangka panjang yang harus dicapai oleh setiap daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nurlina, 2009).

Sebagai salah satu cara dalam menciptakan kesejahteraan yang merata yakni dengan membukanya kesempatan kerja bagi masyarakat luas, mengingat unsur masyarakat sebagai salah satu indikator dalam menggerakkan roda ekonomi pada suatu daerah. peningkatan jumlah penduduk pasti diikuti juga dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. menurut data badan pusat statistik Sulawesi Selatan dalam waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yang cukup fluktuatif tiap tahunnya, begitu juga pada data jumlah angkatan kerja yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



Tabel 1. 1Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2018	63,02	2,04
2019	63,80	0,78
2020	63,40	-0,40
2021	64,73	1,33
2022	66,18	1,45
2023	65,66	-0,52

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan tingkat persentase pertumbuhan periode terakhir mengalami penurunan sebesar 0,52 %.

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan berbagai cara untuk menangani masalah penyerapan tenaga, namun tetap saja terdapat beberapa catatan kritis. Seperti dalam data BPS mencatat bahwa Sulawesi Selatan telah mencatat penambahan jumlah penduduk yang signifikan, namun tidak diimbangi kesempatan kerja dalam kegiatan ekonomi.

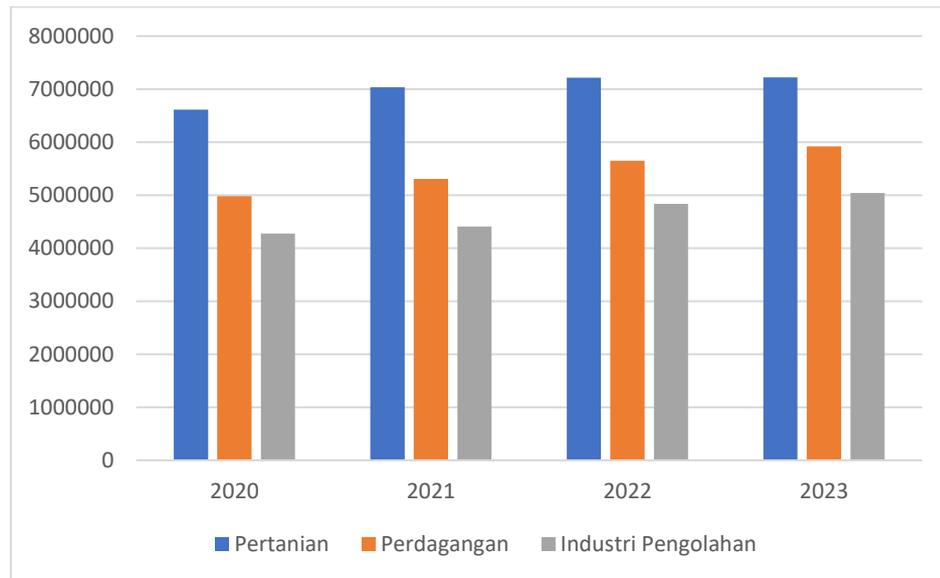
Sektor perdagangan dinilai sebagai salah satu langkah tepat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini dianggap sangat efektif dalam penyerapan tenaga kerja, baik yang berskala kecil maupun besar. Meskipun sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Sulawesi selatan namun, kenyataannya sektor perdagangan sering kali

hasilkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Hal abkan oleh kemampuan sektor perdagangan untuk mengolah dan



mendistribusikan produk dengan margin keuntungan yang lebih tinggi. Menurut penelitian, hasil produk sektor perdagangan memiliki nilai tambah yang signifikan, sehingga lebih menguntungkan daripada hasil produksi sektor lainnya. Ini memungkinkan sektor perdagangan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja terampil dengan memberikan gaji yang lebih kompetitif. Dengan keuntungan yang besar ini sektor perdagangan juga akan memberikan kontribusi yang besar pula pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dapat dilihat melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan ciri struktur yang tersier atau ciri struktur ekonomi yang berbasis perdagangan dan jasa. Hal ini dikarenakan Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran masih terus melihat pertumbuhan yang signifikan dalam pembentukan PDRB.





Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2024)

Gambar 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Seri2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2023

Gambar 1.1 menunjukkan kontribusi tiga sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri dari total keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dikatakan sektor perdagangan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam sektor perdagangan ditunjukkan dalam tabel 1.1 menggambarkan struktur pekerjaan yang diklasifikasikan menurut jenis lapangan usaha. Diketahui



bahwa sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja kedua di Sulawesi Selatan setelah sektor pertanian dan disusul oleh sektor industri pengolahan pada urutan ketiga.

Berdasarkan Data diatas kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB di provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2020-2023 menunjukkan ciri struktur tersier atau ciri struktur ekonomi yang berbasis perdagangan dan jasa. Selama empat tahun terakhir struktur ekonomi menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran masih terus melihatkan pertumbuhan yang signifikan dalam pembentukkan PDRB.

Selain dari PDRB variabel ekonomi yang berperan krusial dalam teori permintaan tenaga kerja meliputi upah atau pendapatan tenaga kerja (Fatmawati, 2015). Upah merupakan salah satu biaya produksi yang sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Biasanya perubahan upah akan cepat memberikan respon terhadap produksi perusahaan, sehingga perusahaan biasanya memilih untuk mengurangi jumlah produksinya. Dengan meningkatnya upah tenaga kerja maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, dari hal tersebut maka akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik terdapat pengusaha yang lebih memilih untuk menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin (Sumarsono, 2009).

Pemberian upah berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja, apabila upah yang diberikan oleh perusahaan dinilai tinggi atau sudah sesuai



asa atau pengorbanan yang diberikan maka para pencari kerja akan

berupaya keras untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Upah minimum Kabupaten/Kota adalah besaran upah minimum yang diterima pekerja tetap di sektor formal di suatu kabupaten/kota berdasarkan kriteria hidup layak (KHL) yang diajukan tiap tahunnya. Pendapatan tenaga kerja disesuaikan dengan kebijakan upah yang difasilitasi oleh sistem upah minimum. Penentuan upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk wilayah di seluruh Indonesia. Adapun data tingkat upah minimum di provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Tingkat Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tahun	Tingkat Upah Minimum (Rupiah)
2018	2.647.767
2019	2.860.382
2020	3.103.800
2021	3.165.031
2022	3.385.145
2023	3.434.298

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 tingkat upah minimum dalam 6 tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 nilai upah minimum terendah sebesar Rp 2.647.767 juta dan kemudian tahun 2023 meningkat menjadi Rp 3.434.298 juta. Ini wajar terjadi, dimana tingkat upah usaha yang lebih baik jumlahnya karena industri berskala besar, selain mampu menyerap tenaga kerja juga mempercepat proses pemerataan dalam arti pendapatan maupun dalam arti kesempatan kerja.

di suatu sektor atau daerah yang mengacu pada kebutuhan hidup minimal



dan upah minimum regional yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan penyerapan tenaga kerja dimana penyesuaian pasar tenaga kerja harus dibarengi dengan peningkatan investasi yang dapat membawa dampak positif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Salah satu sumber modal industri adalah investasi, baik investasi oleh pemerintah (PMDN) maupun swasta (PMA). Investasi dilakukan untuk membentuk faktor produksi kapital.

Pada penelitian ini realisasi PMDN lebih mendominasi pada sektor perdagangan dibanding realisasi PMA dikarenakan sektor perdagangan di Sulawesi Selatan melalui kombinasi pemahaman pasar lokal yang mendalam, dukungan kuat dari pemerintah, jaringan bisnis yang luas, dan persepsi risiko yang lebih rendah. Perusahaan lokal memiliki keunggulan dalam menavigasi lingkungan bisnis setempat dan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Ada banyak definisi tentang investasi, salah satunya investasi adalah proses pengelolaan uang (Fahmi, 2015). Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari modal yang dapat diwujudkan dalam bentuk investasi. Investasi tersebut dapat menunjang perekonomian dan perluasan tenaga kerja yang diperoleh dari pemerintah, swasta dan pinjaman luar negeri. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta sarana yang memadai.



engalokasian investasi perlu diarahkan kepada lapangan usaha yang

membangkitkan perekonomian daerah, memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Untuk itu alokasi investasi perlu diprioritaskan kepada Perekonomian, dengan meningkatnya investasi maka akan tercipta kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat dan akhirnya berdampak bagi pengurangan kemiskinan dan lapangan usaha ekonomi lain yang memiliki keterkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi.

Berangkat dari uraian permasalahan diatas sudah banyak yang meneliti terkait penyerapan kerja tapi sangat sedikit yang melihat dari sektor perdagangan maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana “**Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Perdagangan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah PDRB sektor perdagangan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah upah minimum regional berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Realisasi PMDN berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian



Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor perdagangan terhadap

penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi pada sektor perdagangan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan studi atau tambahan bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal PDRB sektor perdagangan, upah minimum regional, investasi sektor perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja.
3. Sebagai proses pembelajaran dan menambah wawasan bagi penulis dalam hal menganalisa dan berpikir.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang produksi meningkat. Oleh karena itu permintaan tenaga kerja disebut sebagai derived demand atau permintaan turunan (Borjas, 2016; McConnell, Brue, & Macpherson, 2013; Santoso, 2012). Untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka perusahaan harus menjaga permintaan masyarakat atas barang yang diproduksi agar stabil atau mungkin meningkat. Dalam menjaga stabilitas permintaan atas barang produksi perusahaan dapat dilakukan dengan pelaksanaan ekspor, sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja dapat dipertahankan pula.

Permintaan tenaga kerja memainkan peran penting dalam penilaian kebijakan. Permintaan tenaga kerja memiliki karakter individu di pasar tenaga kerja. Tenaga kerja dibeli bukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, tetapi dibeli karena tugas tertentu untuk dipenuhi dan memiliki layanan yang diberikan (Abdurrahmanov &



Zokirova, 2013). Tingkat permintaan tenaga kerja oleh individu perusahaan yang dapat dimaksimalkan keuntungan terjadi pada saat nilai produktivitas tenaga kerja sama dengan biaya marginal tenaga kerja (Santoso, 2012).

Penyerapan tenaga kerja ialah banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang telah terisi, yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja di suatu wilayah (Konadi, 2014). Penduduk yang bekerja tentu akan terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa. Banyak tenaga kerja yang tersedia tetapi tidak dapat terserap oleh industri dikarenakan keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar ataupun industri, disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengadakan pendidikan ataupun pelatihan terhadap tenaga kerja agar memiliki skill yang berkualitas.

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pentingnya modal manusia dalam pembangunan telah dimulai pada tahun 1960 - an berdasarkan pemikiran Theodore Schultz tentang *investment in human apital*. Menurut Schultz, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi alam pembangunan. Dalam perkembangannya, Schultz juga



memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga, hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian/keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Mengingat karena kesempatan kerja sangat terbatas maka pemerintah tentu melakukan upaya dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan yang nantinya dapat menampung maupun mempengaruhi tingkat pengangguran yang berada di tengah masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Semakin bertambahnya lapangan pekerjaan tentu akan membawa dampak yang sangat luas terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Upaya perluasan kesempatan kerja ditujukan untuk mendorong pasar tenaga kerja yang fleksibel, termasuk dalam upaya penurunan biaya ekonomi yang tinggi agar terciptanya lapangan pekerjaan (Ridwan, 2014).

Penyerapan tenaga kerja menunjukkan jumlah atau kuantitas dari tenaga kerja yang digunakan pada beberapa sektor atau unit usaha tertentu. Atau dengan kata lain tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dipekerjakan dalam satu unit usaha (Areta, 2018). Selain itu penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan nilai produksi. Karena semakin tinggi nilai produksi maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal ini didukung oleh penelitian udiawan (2013) dimana naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi berpengaruh pada nilai produksi.



Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi akan mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang terpenting dari tenaga kerja bukanlah dari segi kuantitas melainkan kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik maka akan terjadi peningkatan produksi. Tenaga kerja memiliki sifat heterogen baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, kemampuan kerja, kesehatan, pendidikan, keahlian dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan tenaga kerja guna mendukung pembangunan nasional Indonesia (*Manpower Planning*). Dengan adanya kesempatan kerja juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian yang menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Prihatini, 2020).

Penyerapan tenaga kerja bisa dikaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, yang dimana permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Didalam dunia kerja atau dalam hal penyerapan tenaga kerja di setiap sektornya berbeda-beda untuk penyerapan tenaga kerjanya, misalkan saja pada keahlian khusus, pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk dapat bekerja pada sektor formal (Bellante, 2006).

Beaudry (2018) menyatakan bahwa rendahnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi dari beberapa faktor-faktor, seperti *output*, jumlah perusahaan, upah dan produktivitas tenaga kerja. Dimana



perkembangan *output* mengindikasikan perkembangan permintaan pasar. Semakin tinggi permintaan pasar akan *output*, semakin banyak produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja oleh sektor ekonomi.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya adalah pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah “proses”, bukan gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah.

Pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya, baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi (Yunarko, 2007).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar



harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005:56), sedangkan menurut BPS Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka produk domestik regional bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

Pertama, menurut pendekatan produksi. dalam pendekatan produksi, produk domestik regional bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Robinson Tarigan, 2005). Kedua, menurut pendekatan Pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha,



penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Robinson Tarigan, 2005). Ketiga yaitu,menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto. Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB yaitu, mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian.

Athur Malvin Okun (1962) dalam karyanya berjudul: Potential Gnp: Its Measurement And Significance, yang dipublikasikan Oleh Cowles Foundation, Yale University, Menggambarkan bahwa Perubahan Produk suatu perekonomian akan merubah penggunaan pekerja, meningkatnya produksi akan meningkatkan penggunaan pekerja dan mengurangi pengangguran. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu



daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya dan membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

2.1.3 Teori Upah Minimum

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021).

Menurut Gilarso (2003), upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso, upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja sebagai karyawan atau buruh).



Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMP), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan jenis pekerjaan.

Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep upah umum yang mana pada kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan pemerintah. Negara berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin. Selanjutnya Sastrohadiwiryo (2003), menyatakan bahwa perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak.

Kebijakan mengenai upah minimum menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ekonom. Kebanyakan para ekonom menyatakan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum sering menyebabkan



terjadinya pengangguran sebagian pekerja. Namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan itu setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lainnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Suryahadi (2003), bahwa keefisien dari upah minimum untuk semua pekerja dari angkatan kerja adalah negatif, kecuali pekerja kerah putih (*white collar*). Hal ini sesuai dengan kerangka teoritis bahwa upah minimum akan mereduksi kesempatan kerja dari pekerja dengan skill yang rendah di sektor formal.

2.1.4 Investasi

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain Investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh investor dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan (Fitriawati dkk, 2024). Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.



Menurut A.Y Luntungan (2017), Investasi merupakan salah satu

faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi peningkatan terhadap tingkat kesejahteraan, produktivitas, distribusi pendapatan serta kesempatan kerja. Atau dengan kata lain investasi memiliki peran penting dalam ekonomi makro yaitu mempengaruhi permintaan agregat. Sedangkan, Dornbusch & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang.

Investasi sebagai pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik dan persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan



meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Tokoh Neo Klasik, Solow dan Swan memusatkan perhatiannya agar bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output akan saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad,2010).

Penanaman modal dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2007 dibagi menjadi dua yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal



untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam teori ekonomi Keynes tentang permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan agregat mencakup komponen seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih (ekspor dikurangi impor). Dalam teori ini, investasi menjadi salah satu komponen kunci yang mampu meningkatkan permintaan agregat disini ditekankan bahwa peningkatan permintaan agregat melalui investasi, termasuk di sektor perdagangan, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Dalam konteks ini, investasi dalam negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta, di sektor perdagangan, seperti pembangunan infrastruktur perdagangan, pengembangan teknologi, serta penambahan modal kerja, dapat menciptakan dampak luas terhadap peningkatan kesempatan kerja dan



kesejahteraan masyarakat. Teori ini berfokus pada investasi pemerintah dan intervensi dalam situasi di mana pasar tidak mampu menciptakan cukup lapangan kerja, terutama selama periode resesi. Dalam hal ini, pemerintah bisa berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur perdagangan, pusat logistik, atau dukungan finansial bagi pedagang kecil, yang akan memicu peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Teori Keynesian juga menekankan pada konsep *multiplier effect*, yang menggambarkan bagaimana investasi awal dalam suatu sektor akan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar melalui rantai pasok. Dalam konteks sektor perdagangan, investasi dalam infrastruktur atau teknologi perdagangan dapat memberikan dampak yang meluas ke sektor-sektor terkait. Misalnya, ketika sebuah perusahaan berinvestasi dalam pembangunan pusat distribusi, tidak hanya pekerja konstruksi yang akan mendapatkan manfaat langsung, tetapi juga perusahaan transportasi yang terlibat dalam distribusi barang, pemasok barang yang mendistribusikan produk mereka melalui fasilitas tersebut, serta tenaga kerja yang terlibat dalam operasi dan manajemen fasilitas.

Efek pengganda ini bekerja dengan cara meningkatkan pendapatan para pekerja yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proyek investasi tersebut. Peningkatan pendapatan tersebut kemudian akan mendorong konsumsi di sektor lain, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor-sektor tersebut.

Misalnya, pekerja yang menerima gaji dari pekerjaan di proyek infrastruktur perdagangan akan menggunakannya untuk membeli



barang dan jasa, sehingga meningkatkan permintaan di sektor konsumsi dan menciptakan lapangan kerja di sektor tersebut.

Investasi dalam sektor perdagangan juga bisa memiliki efek jangka panjang yang signifikan terhadap perekonomian. Misalnya, pembangunan pusat distribusi yang efisien akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan perdagangan domestik di pasar global. Hal ini akan membuka peluang baru untuk ekspansi bisnis, meningkatkan volume perdagangan, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja di masa mendatang.

2.2 Hubungan Antar Variabel Dependen dan Variabel Independen

2.2.1 Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Hukum Okun (Mankiw, 2003) menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan *GDP (Gross Domestic Product) riil*, di mana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan *GDP riil*. Hukum Okun ini, dijelaskan seperti ini bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat kaitannya dengan perubahan dalam PDRB riil tahun ke tahun, seperti terlihat pada garis titik sebar pengamatan yang berslope negatif. Pada dasarnya penjelasan tersebut menggambarkan bahwa Meningkatkan PDRB akan menurunkan Pengangguran, jumlah pekerja yang tersedia akan terserap oleh unit-unit usaha akan semakin banyak. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan menentukan daya serap Tenaga kerja.

Apabila terjadi peningkatan nilai PDRB pada sektor – sektor



ekonomi yang ada akan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang akan tersedia. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sektor ekonomi akan mendorong dibukanya lapangan kerja yang baru. Tidak hanya untuk meningkatkan sektor ekonomi yang sedang berkembang saja, namun dengan dibukanya lapangan pekerja yang baru akan mengurangi jumlah pengangguran. Penelitian yang dilakukan Budiarto et al. (2015) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Warapsari et al. (2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Penelitian Berikutnya oleh Hartono et al. (2018) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.

2.2.2 Hubungan Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Mankiw (2003), dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja upah melakukan penyesuaian untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Keseimbangan antara besarnya upah dan jumlah tenaga kerja tercapai saat upah minimum meningkat maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan penawaran tenaga kerja oleh para pencari kerja. Sebaliknya, apabila upah minimum lebih besar dibandingkan penawaran tenaga kerja.

Upah sebagai salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan



tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi permintaan akan didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan.

2.2.3 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Harrod-Domar menyatakan bahwa hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja yaitu investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka dari itu setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi untuk membantu membuka lapangan kerja sehingga kelak dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi ataupun jumlah industri. Investasi bertujuan untuk memaksimalkan output total ada satu titik waktu atau satu periode waktu. Jumlah investasi yang



terlaksana atau terealisasi sangat berperan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam satu masyarakat dan kurangnya investasi akan menimbulkan pengangguran (Sukirno, 1994). Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaannya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi lainnya.

2.3 Tinjauan Empiris

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah didapat dan menjadi landasan pemikiran penulis untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah:

Effendi (2014). Melakukan penelitian dengan data yang diperoleh dari badan pusat statistik dan Bappeda provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005 hingga 2013. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang meliputi model terbalik, asumsi klasik dan statistik kriteria. Hasilnya menunjukkan hal itu secara simultan PDB dengan upah mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap tenaga kerja tuntutan. Secara parsial PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Ketika upah berpengaruh negatif dan signifikan



terhadap permintaan tenaga kerja di sembilan perekonomian sektor di Provinsi Sumatera Selatan.

Pangesti dkk (2018). Melakukan Penelitian dengan menggunakan analisis data panel dengan bantuan program Eviews 9.0 pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010-2015. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan terdapat hubungan positif pada variabel PDRB dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Jawa Timur. Sebaliknya pada variabel IPM dan UMK yang muncul dengan pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Jawa Timur.

Hafsah (2015). Melakukan penelitian tentang penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur dengan alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang mencakup 2 kotamadya dan 6 kabupaten di wilayah Gerbangkertosusila selama kurun waktu enam tahun. Hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sektor angkutan dan komunikasi serta sektor jasa, kedua sektor ini memberikan dorongan serta daya tarik bagi sektor pendukungnya, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan yang didominasi oleh sektor non-tradeable akan cenderung beresiko dikarenakan sektor ini lebih padat modal, padat teknologi, dan memiliki tingkat penyerapan tenaga a yang minim.



Pangastuti (2015). meneliti tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan Metode Random Effect (REM). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif sebesar 0.000504. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 0.06523. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 2.480002. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan besarnya koefisien 0.000170. Nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP), serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Pengangguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya.

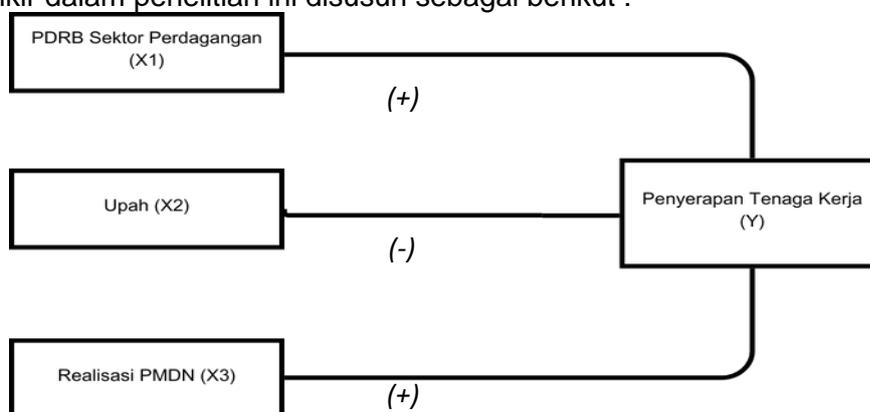
Agung (2015). Meneliti bagaimanapengaruh PDB, inflasi dan upah minimum di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) selama dua puluh tahun dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier ganda dengan aplikasi EViews. Setelah dilakukan pengujian, hasil yang



diperoleh adalah secara simultan, tiga variabel independen yang diuji berpengaruh signifikan, sedangkan secara parsial, Produk Domestik Bruto (PDB) dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013".

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan latar belakang, dan tinjauan teoritis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka rangkuman kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :



Gambar 2. 1Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini, kerangka konseptual ini dibuat dengan tujuan menarik hipotesis tentang analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan. Dimana perkembangan sektor perdagangan dan penyerapan tenaga kerja saling mempengaruhi dengan cara yang berbeda.

2.5 Hipotesis Penelitian



Hipotesis penelitian merupakan suatu kemungkinan atau dugaan

sementara untuk menjawab masalah yang diajukan dan masih belum teruji kebenarannya berdasarkan fakta yang ada. Berpedoman pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian serta kerangka konseptual pada **Gambar 2.1** maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga PDRB sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.
2. Diduga upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.
3. Diduga Realisasi PMDN berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

